



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tembusan : -
Nomor : 10 / 1 / 2025
Tanggal : 9 / 1 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Net Konsep Tanggapan Permohonan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Plh. Sekretaris Ditjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui surat Nomor 800.1.4.3/1390/BKD/2024, tanggal 30 Desember 2024, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan Mutasi Pejabat Fungsional sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) orang, dalam rangka Perpindahan Vertikal dan Perpindahan diagonal.
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat dilantik tanggal 24 Juni 2024.
3. Permohonan tersebut masuk ke SIOLA tanggal 6 Januari 2025 nomor registrasi **76796D5**.
4. Berdasarkan Angka 3 huruf b Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, tanggal 29 Maret 2024, Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, ditegaskan bahwa untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari **Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah**.
5. Sesuai dengan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, terhadap 165 (seratus enam puluh lima) orang yang diusulkan menurut hemat kami Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Fungsional tanpa melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Sekretaris Ditjen tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan net konsep Surat Bapak Plh. Sekretaris Ditjen atas nama Dirjen Otda kepada Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,


Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691108 199003 1 001

